

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI DAN
PENGUATAN PEREKONOMIAN UNTUK MENDUKUNG
KEBIJAKAN STRATEGIS PENCIPTAAN KERJA**

**DEVI
03051170082**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perbandingan LPI (SWF Indonesia) yang dibentuk melalui Undang-Undang Cipta Kerja dengan SWF yang dilaksanakan di beberapa negara lain dan pembentukan LPI sebagai solusi yang tepat untuk meningkatkan investasi dan menguatkan perekonomian untuk mendukung kebijakan strategis penciptaan kerja di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan LPI. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diolah dari beberapa literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPI sedikit berbeda dengan dana abadi negara lain karena dana abadi negara lain dibentuk ketika pemerintah suatu negara memiliki surplus anggaran dan memiliki utang luar negeri yang kecil sehingga lebih bergantung pada dana dari kekuatan negara sendiri yang biasanya berasal dari surplus hasil ekspor komoditas, hasil privatisasi, surplus fiskal, atau surplus devisa dalam bentuk cadangan mata uang asing yang dipegang oleh Bank Sentral di negara yang bersangkutan, sedangkan LPI bergantung pada sumber dana yang datang dari luar negeri. Selain itu, LPI hanya mengelola dana investasi di dalam negeri saja khususnya untuk proyek pembangunan, sedangkan SWF negara lain umumnya dapat menginvestasikan dananya ke luar negeri. Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Indonesia diuntungkan dengan adanya pembentukan LPI. Pembentukan LPI dapat menambah aliran modal ke Indonesia sehingga dapat menstimulasi aktivitas ekonomi menjadi lebih aktif yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. LPI dapat mendanai pembangunan ekonomi dan sosial baik secara fisik maupun nonfisik, serta bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, untuk mengurangi utang negara, menyebabkan APBN tidak terlalu terbebani, dan mengatasi utang BUMN infrastruktur. Pembentukan LPI bertujuan untuk diversifikasi ekonomi dan dapat meningkatkan FDI serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang apabila pelaksanaannya dilakukan dengan baik.

Kata kunci: Lembaga Pengelola Investasi (LPI), Dana Abadi, Undang-Undang Cipta Kerja, Investasi Asing, Infrastruktur

**THE ESTABLISHMENT OF INDONESIA INVESTMENT
AUTHORITY IN ORDER TO ENCOURAGE INVESTMENT
AND STRENGTHEN THE ECONOMY
THROUGH JOB CREATION**

**DEVI
03051170082**

ABSTRACT

The aim of this research is to understand the comparison of INA which was established through The Job Creation Law with SWFs in other countries and the establishment of INA as a solution in order to encourage investment and strengthen the economy through job creation in Indonesia.

The research method used by the author is a descriptive normative research method by studying the legal regulations related to the INA. This research was conducted with secondary data derived from various related literatures.

This research showed that INA was slightly different from SWFs in other countries because other countries' SWF was formed when the government had a budget surplus and had a small foreign debt so that it relied more on funds originating from the own state power which usually came from surplus from commodity exports, money from privatizations, fiscal surplus, or foreign exchange surplus in the form of foreign currency reserves which held by the Central Bank, while INA relied on funds originating from abroad. In addition, INA only managed the investment funds in the country, especially for infrastructure projects, while SWFs from other countries could generally invest their funds abroad. Economic recovery after the COVID-19 pandemic in Indonesia would be benefited from the establishment of INA. The establishment of INA might increase the capital flow to Indonesia so that it might stimulate economic activity to become more active which could create economic growth. INA could fund economic and social development both physically and non-physically, as well as for the purposes of creating employment opportunities, reducing state debt, making state budget less burdened, and overcoming the infrastructure debt capacity of SOEs. The establishment of INA aimed to diversify the economy and would increase FDI as well as support economic growth in Indonesia in the long term if it was implemented properly. INA must work efficiently and effectively so that the utilization of these investment funds could provide optimal returns.

Keywords: *Indonesia Investment Authority (INA), Sovereign Wealth Fund (SWF), The Job Creation Law, foreign investment, infrastructure*